

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI MELALUI PRAKTIK PENGAJARAN YANG BERWAWASAN DEMOKRATIS

Maya Mustika Kartika Sari

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Hukum, Universitas Negeri Surabaya, mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji pandangan filosofis dan teoritis dalam mengejawantahkan konsep merdeka belajar yang menjadi isu utama dalam perubahan kurikulum di perguruan tinggi. Kebijakan merdeka belajar menuai berbagai respon dari masyarakat, baik ditinjau secara terminologi, interpretasi, maupun implementasi. Konsep merdeka belajar akan dikaji dalam terminologi filsafat demokrasi, yang menekankan pada kesetaraan dalam pendidikan. Merupakan fakta yang diakui bahwa ada hubungan yang erat antara demokrasi dan pendidikan. Dalam demokrasi, pendidikan diberikan keutamaan, karena itu merupakan prasyarat untuk kelangsungan hidup dan kesuksesan yang pertama. Demikian pula, pendidikan memupuk temperamen demokratis di benak setiap insan warga negara. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan persaudaraan, martabat individu, kerjasama, berbagi tanggung jawab dll diterapkan pada pendidikan agar lebih efektif, bermakna, relevan dan berguna. Ada hubungan yang tidak terpisahkan antara demokrasi dan pendidikan. Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari spektrum pendidikan. Diakui di semua sisi bahwa otot demokrasi bergantung pada karakter dan kecerdasan semua warganya. Oleh karenanya praktik pengajaran yang demokratis selanjutnya menjadi titik tekan dalam kurikulum merdeka belajar. Karena demokrasi dapat berfungsi dengan baik hanya jika semua warganya dididik dengan baik. Demokrasi harus memberikan tujuan untuk pendidikan dan dengan demikian, prinsip-prinsip demokrasi harus tercermin dalam tujuan, kurikulum, metode pengajaran, administrasi dan organisasi, disiplin, sekolah, guru, dll.

Kata Kunci: Pendidikan, Demokrasi, Partisipatif, Musyawarah

PENDAHULUAN

Fungsi pendidikan dalam tujuan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut terefleksi dalam tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Untuk jenjang Pendidikan Tinggi, ditetapkan dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Selanjutnya diatur melalui Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diimplementasi secara teknis dalam Buku Panduan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2020.

Merujuk dari uraian tersebut di atas, maka MBKM merupakan refleksi dalam mengembangkan pendidikan yang demokratis. Tujuan pendidikan demokratis adalah untuk menghasilkan warga negara demokratis yang tidak hanya dapat memahami secara

objektif berbagai masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya, tetapi juga membentuk penilaian independen mereka sendiri atas masalah-masalah rumit tersebut. Proses pendidikan harus menanamkan dalam diri warga negara semangat toleransi dan menyalakan keberanian keyakinan. Itu harus bertujuan untuk menciptakan dalam diri mereka semangat untuk keadilan sosial dan pelayanan sosial. Ia harus melengkapi mereka dengan kekuatan penilaian, pemikiran ilmiah dan menimbang yang benar dan yang salah. Pendidikan bertujuan untuk memungkinkan siswa menjadi manusia yang berwawasan sosial yang mampu mengatur urusan mereka sendiri dan hidup dengan orang lain secara memadai.

Konsep pendidikan demokratis, dikemukakan oleh Dewey (1916), dalam *Democracy and Education* tentang pendidikan demokrasi dalam teori dan beasiswa pendidikan. Sebuah karya yang awalnya berjudul *An Introduction to Philosophy of Education* yang menginspirasi teori dan penelitian tidak hanya dalam filsafat pendidikan tetapi juga dalam beasiswa pendidikan secara lebih umum (Doddington, 2018). Untuk waktu yang lama, "pendidikan demokratis" telah berfungsi sebagai titik simpul (Laclau, 2007; Mannion, Biesta, Priestley, & Ross, 2011) dalam teori dan penelitian pendidikan, berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk berbagai disiplin ilmu pendidikan, wacana demokrasi dan pendidikan. Demokrasi

dimaknai sebagai kenyataan dan cara hidup yang harus dikenalkan sejak awal pendidikan dan nilai-nilainya perlu dipraktekkan di lembaga pendidikan..

Pendidikan harus berorientasi pada pengembangan kualitas-kualitas dasar karakter yang esensial bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi (Barber, 1994). Pendidikan demokrasi benar-benar mendukung perkembangan individu yang maksimal, kurikulum dalam demokrasi harus fleksibel sehingga dapat memenuhi selera dan temperamen yang beragam, bakat dan kemampuan, kebutuhan dan minat mahasiswa. Ini berusaha untuk merangsang pemikiran dan kemampuan kreatifnya.

Lebih lanjut, penting bahwa kurikulum demokrasi harus mempertimbangkan kondisi lokal dan tuntutan lingkungan (Duarte, 2016). Unsur sosial sangat ditekankan di dalamnya. Dengan kata lain, kurikulum harus disesuaikan dengan pandangan dan temperamen sosial. Harus ada ketentuan untuk memasukkan keterampilan dalam kurikulum demokratis. Di atas segalanya, kurikulum harus dibangun atas dasar prinsip integrasi. Itu tidak boleh dipisahkan menjadi bagian-bagian yang terfragmentasi. Ini harus dibedakan pada tahap selanjutnya agar sesuai dengan beragam minat, sikap, bakat dan kemampuan mahasiswa. Selain itu, harus fleksibel dan dinamis agar sesuai dengan waktu yang berubah.

Masalah utama dalam kehidupan kompleks dari kebanyakan ruang perkuliahan adalah praktik pengajaran. Pendekatan paling populer yang paling sering digunakan adalah behaviorisme sederhana — hukuman dan penghargaan. Pendekatan ini tidak pernah mempertanyakan klaim pengetahuan, elitisme budaya, dari materi yang diajarkan. Pengajaran yang demokratis memfokuskan praktik pengajaran berdasarkan pembangunan komunitas, bukan hanya pada cara namun mengubah arah, dan tujuan, pendidikan. Melakukan tindakan eksplorasi untuk menerapkan apa yang disebut pendidikan demokratis melalui enam tema: membina hubungan, memberdayakan siswa, mengajar dan menggunakan keterampilan demokratis, struktur pendidikan yang demokratis, praksis guru yang demokratis, dan mengelola hambatan.

Artikel ini berusaha mengkaji implementasi kebijakan merdeka belajar dalam kerangka pendidikan demokratis ditinjau secara filosofis dan praksis praktik pengajaran.

METODE

Studi ini mengambil titik awal pemahaman interpretatif bahwa realitas Merdeka-Belajar dibangun melalui

wacana (*discourses*), dipahami dalam istilah teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (Jorgensen & Phillips, 2002). Wacana adalah sistem makna dan nilai termasuk pertukaran linguistik dan tindakan di mana pertukaran tersebut tertanam. Definisi ini pengakuan bahwa keberadaan realitas material secara independen dari sistem hubungan sosial apa pun dan manusia memberi makna pada ini melalui "konfigurasi diskursif tertentu" (Laclau, 1990:101). Dengan demikian, diasumsikan bahwa pendidikan demokrasi dapat dibangun di atas data politik dan / atau pendidikan. Untuk itu makna data terkait merdeka belajar idikonstruksi dalam kaitannya dengan asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis pendidikan demokratis.

PEMBAHASAN

Inovasi dan reformasi pendidikan adalah proses yang berkelanjutan yang tidak akan pernah benar-benar selesai. Hal tersebut mendorong pada diskusi yang intensif, tidak hanya tentang efektivitas sistem Perguruan tinggi saat ini tetapi juga tentang reformasi hampir semua elemen pendidikan. Keberhasilan pendidikan tinggi bergantung pada "literasi" mahasiswa. Secara khusus, metode pengajaran dan pembelajaran telah - dan masih - dipertanyakan, dan tuntutan diartikulasikan untuk menciptakan iklim pendidikan tinggi dan lingkungan belajar yang berbeda masih kurang terefleksi. Oleh sebab itu istilah literasi perlu diperluas untuk mencakup aspek-aspek seperti "literasi politik" atau "literasi demokratis", yang berarti kualifikasi mahasiswa untuk peran masa depan mereka sebagai warga negara. Dalam konteks ini, peran perguruan tinggi dalam kualifikasi calon warganegara masa depan yang bertanggung jawab dan partisipatif dalam masyarakat yang demokratis semakin terasa.

Secara umum pemikiran kritis dan mandiri adalah prasyarat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan lembaga pendidikan. Demikian pula, kemungkinan untuk melihat pengakuan yang tumbuh, di bagian dari kekuatan politik dan sosial, dan opini publik secara umum, tentang pentingnya sistem sekolah dalam menciptakan warga negara yang bertanggung jawab dan sadar, dan dalam membangun masyarakat demokratis yang terbuka untuk berubah. Mendidik generasi muda dalam semangat demokrasi dan mempersiapkan mereka untuk peran masa depan mereka sebagai warga negara yang aktif telah menjadi amanat sistem pendidikan yang demokratis.

Kebijakan merdeka belajar dapat dimaknai sebagai refleksi dari upaya mengembangkan pembelajaran yang demokratis. Bahkan hal tersebut merupakan

amanat Undang-Undang Sisdiknas yang belum terefleksi secara aktual dalam praktik pengajaran, sehingga semangat warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran belum terwujud secara otentik. Oleh sebab itu, diskursus terkait merdeka belajar, merupakan arena dalam mengaktualisasi praktik demokrasi.

Memahami Merdeka Belajar dalam Perspektif Pendidikan Demokratis

Pendekatan dalam pendidikan demokratis dapat ditinjau menjadi tiga kelompok berbeda dengan konsepsi yang berbeda tentang hubungan antara pendidikan dan politik. Pendekatan pertama adalah pendidikan untuk demokrasi (Biesta & Lawy, 2006; M. Levinson, 2011). Perspektif ini menafsirkan demokrasi sebagai keharusan normatif universal dan pendidikan sebagai “instrumen” untuk mencapai tujuan ini. Logikanya adalah bahwa pendidikan dapat berkontribusi pada perbaikan masyarakat masa depan. Pendidikan warga negara adalah tujuan kurikuler (dan terkadang subjek kurikuler) yang tertanam dalam sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan diarahkan untuk kondisi dan persyaratan bagi siswa untuk menguasai elemen karakter demokratis (yaitu, warga negara yang berpengetahuan dan rasional). Kebijakan kurikulum berorientasi pada musyawarah dan / atau partisipatif yang menekankan perlunya kewarganegaraan yang lebih musyawarah dan aktif. Contoh dari konvergensi ini adalah kurikulum untuk studi kewarganegaraan di British Columbia di mana siswa "secara individu dan dengan orang lain membahas masalah kewarganegaraan — lokal hingga global — untuk tujuan menjadi pembuat keputusan yang diberdayakan dalam tindakan sipil" (Ruitenberg, 2015: 6). Pendidikan juga diharapkan menjadi “alat” esensial untuk mobilitas sosial.

Pendekatan kedua adalah pendidikan dalam demokrasi (Bradshaw, 2014). Pendekatan ini, didefinisikan oleh Levinson sebagai situasi di mana "orang dewasa" secara demokratis melegitimasi kontrol atas pendidikan dalam demokrasi (M. Levinson, 2011:125). Baik demokrasi dan pendidikan bersifat instrumental daripada normatif. Logika yang dibangun bahwa demokrasi bukanlah keharusan normatif melainkan sistem politik yang secara efektif mengamankan aturan elit (elitisme) atau kebebasan individ. Pendidikan harus bebas dari aspirasi moral dan kebutuhan untuk menanggapi tuntutan individu warga (Ichilov, 2012). Kebijakan pilihan, standarisasi, dan akuntabilitas, seperti "Pilihan di Sekolah" Swedia, "Standar Negara Bagian Inti Umum" AS, atau Program

Internasional Penilaian Pelajar Internasional, dapat ditemukan di banyak negara dan tingkat pendidikan. Namun, pendidik demokratis sangat kritis terhadap pendekatan ini. Epistemologi individualis dan rasionalis yang mendasari kebijakan ini ditantang oleh konstruksi pengetahuan intersubjektif seperti yang ditemui dalam pemikiran Dewey (Biesta, 2011; Meens & Howe, 2016). Dikatakan juga bahwa, di bawah penampilan netralitas normatif, memang menciptakan kerangka normatif alternatif berdasarkan individualisme dan persaingan. Lebih lanjut, meskipun kebijakan ini dapat berfungsi dalam sistem demokrasi agregat atau elitis, terdapat konsensus akademis yang jelas bahwa, secara keseluruhan tidak mencoba untuk menanggapi prinsip atau tujuan demokrasi.

Pendekatan ketiga adalah apa yang Biesta dan Lawy (2006) definisikan sebagai pendidikan melalui demokrasi. Pendekatan ini tampaknya menjadi kerangka kerja yang disukai bagi sebagian besar pendidik demokratis. Para intelektual terlibat dalam aktivitas partisipatif, musyawarah, multikultural, agonistik kritis dan memiliki pandangan yang sama tentang manfaat demokrasi. Pendekatan ini berbeda dalam konseptualisasi hubungan antara pendidikan dan demokrasi. Sebagaimana telah disebutkan, pendekatan pendidikan untuk demokrasi mengkonseptualisasikan pendidikan sebagai alat demokrasi masa depan, dan pendidikan dalam pendekatan demokrasi memahami pendidikan dan demokrasi untuk saling mandiri. Sebaliknya, dalam pendidikan melalui pendekatan demokrasi, pendidikan dan demokrasi dibayangkan dibayangkan mengakomodasi keduanya secara bersama (Stevenson, 2015). Di sini pembuatan kebijakan pendidikan dikonseptualisasikan melalui etos demokrasi yang melibatkan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Secara filosofis, Kebijakan Merdeka Belajar dapat dijawab melalui ketiga pendekatan tersebut. Namun, sebagai konsepsi politik dan pendidikan, perlu adanya kesepahaman yang dirumuskan dalam ruang kebebasan dengan berpegang pada tanggung jawab sosial. Pendekatan komprehensif memungkinkan inovasi dan eksperimen dalam kebijakan pendidikan. Hal tersebut yang dapat dimaknai dalam kebijakan Merdeka Belajar.

Praktik Pengajaran Merdeka Belajar Melalui Pendidikan Demokratis

Rekomendasi untuk praktik pendidikan demokrasi juga termasuk dalam dua pendekatan yang disebutkan di atas. Perlu dicatat di sini bahwa, karena pendidikan dalam pendekatan demokrasi, memahami pendidikan

dan demokrasi secara mandiri, hanya ada sedikit atau tidak ada rekomendasi untuk praktik yang terkait dengan pendekatan ini. Sebaliknya, pendekatan pendidikan untuk demokrasi dapat ditemukan di enam wacana pendidikan pro demokrasi dan telah sangat berhasil mempengaruhi praktik pendidikan di seluruh dunia. Dari perspektif ini, proposal praktis menentukan kualitas warga negara demokratis dan memeriksa pedagogi yang mungkin lebih baik berkontribusi pada pembelajaran kualitas ini. Mahasiswa di sini adalah warga negara dalam proses, mendapatkan persiapan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk tampil sebagai warga negara yang demokratis. Pedagogi dan bidang kurikulum tertentu di sini direkomendasikan selama dianggap efektif dalam mendorong pembelajaran demokratis ini. Dalam hal ini, hasil dari penelitian empiris sering digunakan untuk mengidentifikasi pedagogi yang relevan.

Kurikulum disusun dengan bertujuan untuk mempromosikan pengetahuan politik dan pemikiran kritis (Gibson & Grant, 2012). Pendidik demokratis musyawarah merekomendasikan pengajaran dan pembelajaran musyawarah, pemecahan masalah, dan keterampilan komunikasi melalui masalah kontroversial.. Demokras ipartisipatif merekomendasikan bahwa mahasiswa perlu mempelajari keterampilan partisipatif (Parker, 2010). Peluang untuk berpartisipasi dalam struktur tata kelola kelas dan sekolah, dalam kegiatan KKN, serta simulasi dan permainan terbukti berkontribusi terhadap tujuan ini. Pendidik demokratis multikultural berpendapat bahwa siswa memiliki kesempatan untuk terlibat dengan budaya sendiri dan budaya lain (Alexander, 2007). Pendidik demokratis kritis bertujuan untuk mengkaji masalah sosial sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan untuk mengungkap struktur dominasi dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan. Pendidik demokratis agonistik merekomendasikan untuk mendidik emosi politik, dan untuk membantu mahasiswa memahami perbedaan antara klaim politik dan moral (Backer, 2017).

Dalam pendekatan pendidikan melalui demokrasi, Mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar sebagai bagian dari komunitas di mana mereka memiliki suara dan dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan dengan satu sama lain. Mahasiswa secara de facto bertindak sebagai warga negara, dan pembelajaran demokratis dilaksanakan melalui partisipasi demokratis dengan pendidikan dan politik dipahami sebagai saling terkait. Dalam perspektif ini, partisipasi demokrasi bersifat edukatif

dan pendidikan diharapkan dapat melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi demokrasi. Yang penting bukanlah tujuan kurikuler yang dibiarkan terbuka, tetapi pengalaman pedagogis yang juga dianggap politis.

Hanya tiga dari wacana yang diidentifikasi membuat proposal eksplisit untuk pendidikan melalui demokrasi. Proses pendidikan berpusat pada mahasiswa, sementara pernah diakui secara konsensus sebagai contoh jelas dari pendidikan demokratis, saat ini mengambil peran yang diperebutkan dalam mendefinisikan arti pendidikan demokratis. Selain itu, usulan lain untuk pendidikan melalui demokrasi telah diajukan. Multikulturalis pascakolonial mempertahankan kebutuhan untuk menciptakan peluang sehingga mahasiswa dapat terlibat dengan epistemologi dalam proses merekonstruksi hubungan antara mengetahui dan menjadi. Pendidik demokratis partisipatif mendukung pedagogi berpusat pada tindakan yang menawarkan peluang nyata untuk berpartisipasi secara demokratis. Contohnya dapat berupa pengembangan kode kurikulum dan pembelajaran komunitas (Helfenbein & Shudak, 2009). Pendidik demokrasi agonistik merekomendasikan pembuatan saluran untuk ekspresi perbedaan pendapat politik untuk singularisasi subjektivitas, dan untuk artikulasi politik mahasiswa dan dosen (Snir, 2017). Logikanya di sini adalah bahwa lembaga pendidikan juga merupakan ruang politik dan oleh karena itu tempat di mana wacana dan aliansi politik dapat muncul.

PENUTUP

Simpulan

Hasil tinjauan ini menunjukkan peluang untuk diskusi akademis lebih lanjut tentang kebijakan pendidikan. Dengan sedikit pengecualian, terdapat konsensus yang jelas tentang defisit demokrasi dalam pendidikan dalam kebijakan Merdeka Belajar dan tentang nilai demokrasi dari pendidikan melalui proses demokrasi. Kebijakan pendidikan dapat bertujuan untuk menghasilkan peluang untuk proses pengambilan keputusan partisipatif dan mengeksplorasi potensi dampaknya terhadap kebijakan pendidikan yang ada. Minimnya pembahasan kebijakan di bidang ini mungkin disebabkan oleh komitmen para pendidik demokrasi agonistik untuk berbeda pendapat, dan memandang demokrasi sebagai jalan keluar dari institusionalisasi.

Peta teoritis berguna bagi studi pedagogi dan kurikulum. Tinjauan ini menunjukkan bahwa ada sejumlah pedagogi yang didasarkan pada wacana multikultural transfiguratif dan antagonis yang belum

diselidiki secara empiris. Diskusi tentang kontroversi, konflik, atau masalah, partisipasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan, dan penguatan hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat, tampaknya menjadi fitur utama untuk praktik pendidikan demokratis. Namun, tinjauan ini juga menunjukkan bagaimana berbagai pedagogi yang secara dominan diakui sebagai pendidikan demokratis (misalnya, kegiatan yang mendorong pemikiran kritis, pedagogi musyawarah, simulasi partisipatif) didasarkan pada klaim ontologis, epistemologis, dan etis yang kontroversial dan, oleh karena itu, rentan terhadap kritik.

Saran

Untuk itu pengkajian secara komprehensif dalam implementasi kurikulum merdeka belajar, hendaknya menerapkan preinsip pendidikan demokratis. Diskusi dan penelaahan secara terbuka dapat menghasilkan berbagai inovasi dan penyelesaian yang mengakomodasi berbagai perdebatan terkait kebijakan merdeka belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewey, J. (1916/1985). *Democracy and education*. Carbondale: Southern Illinois University Press.
- Doddington, C. (2018). "Democracy and Education: Is it relevant now? ", *Education* 3–13, 46, 381–384.
- Laclau, E. (2007). *On populist reason*. London, England: Verso.
- Mannion, G., Biesta, G., Priestley, M., Ross, H. (2011). "The global dimension in education and education for global citizenship: Genealogy and critique." *Globalisation, Societies and Education*, 9, 443–456.
- Barber, B. R. (1994). *An aristocracy of everyone*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Duarte, M. (2016). "Educating citizens for humanism: Nussbaum and the education crisis." *Studies in Philosophy and Education*, 35, 463–476.
- Wisler, A. K. (2009). "Of, by, and for are not merely prepositions": Teaching and learning conflict resolution for a democratic, global citizenry. *Intercultural Education*, 20, 127–133.
- Jorgensen, M., Phillips, L. J. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. London. England: Sage
- Biesta, G., Lawy, R. (2006). "From teaching citizenship to learning democracy: Overcoming individualism in research, policy and practice." *Cambridge Journal of Education*, 36, 63–79
- Ruitenbergh, C. W. (2015). "The practice of equality: A critical understanding of democratic citizenship education". *Democracy & Education*, 23(1), 2.
- Bradshaw, R. (2014). "Democratic teaching: An incomplete job description." *Democracy & Education*, 22(2), 3.
- Levinson, M. (2011). "Democracy, accountability, and education". *Theory and Research in Education*, 9, 125–144.
- Ichilov, O. (2012). "Privatization and commercialization of public education: Consequences for citizenship and citizenship education" *Urban Review: Issues and Ideas in Public Education*, 44, 281–301.
- Stevenson, N. (2015). "Revolution from above in English schools: Neoliberalism, the democratic commons and education". *Cultural Sociology*, 9, 534–549.
- Gibson, M. L., Grant, C. A. (2012). Toward a paideia "of the soul": Education to enrich America's multicultural democracy. *Intercultural Education*, 23, 313–324.
- Parker, W. (2010). Listening to strangers: Classroom discussion in democratic education. *Teachers College Record*, 112, 2815–2832.
- Alexander, H. (2007). What is common about common schooling? Rational autonomy and moral agency in liberal democratic education. *Journal of Philosophy of Education*, 41, 609–624.
- Backer, D. I. (2017). The critique of deliberative discussion. A response to "Education for Deliberative Democracy: A Typology of Classroom Discussions." *Democracy & Education*, 25(1), 9.
- Helfenbein, R. J., & Shudak, N. J. (2009). Reconstructing/ reimagining democratic education: From context to theory to practice. *Educational Studies*, 45(1), 5–23
- Snir, I. (2017). Education and articulation: Laclau and Mouffe's radical democracy in school. *Ethics and Education*, 12, 351–363